



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **210317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.418.000.000**

1. Tanah Seluas 135 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 28.29 m2/28.29 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/70 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/20 m2 di KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/270 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/62 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
10. Tanah Seluas 364 m2 di KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
11. Tanah Seluas 163 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
12. Tanah Seluas 104 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp.



120.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di BEKASI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

378.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

378.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

7.500.000**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.173.097.000**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

Sub Total

Rp.

4.976.597.000**III. HUTANG**

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.976.597.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.